

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada tahap studi pendahuluan (*pra-survey*) dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

*Pertama*, sekolah sebagai suatu subsistem sosial ternyata tidak bebas dari konflik yang terjadi antarwarganya, khususnya konflik yang dialami siswa. Konflik-konflik siswa yang berupa konflik antarpribadi (*interpersonal conflict*) dan antarkelompok (*intergroup conflict*) pada umumnya merupakan konflik dalam masalah khusus (*issues-specific conflict*) dan konflik dalam pola-pola interaksi sosial (*relational conflict*), dan belum sampai pada konflik yang bersifat struktural (*structural conflict*). Sebagian besar konflik siswa ini bersifat horizontal, terjadi antarsiswa sendiri, dan hanya sebagian kecil konflik mereka yang bersifat vertikal yang terjadi antara siswa dengan guru dan pimpinan sekolah. Konflik antarsiswa, yang terutama dipicu oleh tidakterpenuhinya kebutuhan psikologis mereka, terentang dari konflik yang sederhana, seperti permusuhan secara psikologis dan ketegangan hubungan sosial, sampai pada konflik yang menjurus pada kekerasan fisik. Persentase siswa yang terlibat konflik yang disertai kekerasan memang kecil, tetapi akibat yang ditimbulkannya tidak bisa diabaikan. Konflik-konflik yang dialami siswa ini ternyata memberikan dampak negatif bagi kondisi psikologis, hubungan sosial siswa, iklim belajar di sekolah, dan terhadap keselamatan jiwa mereka.

*Kedua*, hanya sebagian siswa yang sudah mampu menyelesaikan sendiri konflik horizontal mereka yang sederhana melalui cara kompromi. Namun untuk konflik lainnya sebagian siswa cenderung menggunakan strategi penyelesaian konflik secara tidak konstruktif, yakni dengan menarik diri dari konflik (*withdrawal*), dengan memendam dalam dirinya, yang sebenarnya dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental mereka. Sebagian kecil siswa lainnya bahkan cenderung menyelesaikan konflik dengan cara menentang pihak lawan (*contending*), yang kadang disertai dengan tindakan kekerasan. Penyelesaian konflik melalui pemecahan masalah (*problem solving*) menuju ke arah *win-win solution* cenderung belum banyak digunakan oleh siswa. Sementara itu, ketergantungan siswa kepada pihak lain, khususnya yang memiliki otoritas di sekolah, dalam menyelesaikan konflik masih tinggi.

*Ketiga*, pengajaran yang menyangkut resolusi konflik di sekolah benih-benihnya sebenarnya telah ada, misalnya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Sosiologi. Namun pembahasan tentang konflik dan resolusi konflik dilakukan secara tidak sistematis, dan hanya sebatas penjelasan konsep atau pengetahuan tentang konflik. Guru masih belum secara khusus membina pengetahuan, sikap, keterampilan untuk melakukan resolusi konflik secara konstruktif kepada para siswanya. Sementara kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung penguasaan kemampuan resolusi konflik pun masih belum ada.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan uji coba dan validasi empiris model, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

*Pertama*, implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik dengan pendekatan workshop/lokakarya (*workshop approach*), yang lebih bersifat personal dan afektif, yang diintegrasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, ternyata secara signifikan cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa SMA tentang resolusi konflik. Pengetahuan siswa tentang resolusi konflik meningkat secara signifikan setelah mengikuti implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik. Pengetahuan yang memadai tentang konsep dan strategi resolusi konflik, yang dapat menambah kompetensi warganegara (*civic competence*) dalam hal pengetahuan warganegara (*civic knowledge*) menjadi dasar bagi siswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara damai, demokratis, dan konstruktif.

*Kedua*, implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik dengan pendekatan workshop yang diintegrasikan dengan Pendidikan Kewarganegaraan secara signifikan cukup efektif meningkatkan sikap siswa SMA terhadap resolusi konflik ke arah yang lebih positif. Sikap siswa terhadap resolusi konflik setelah mengikuti implementasi model ini lebih positif dibandingkan dengan sikap siswa sebelum mengikuti implementasi model. Sikap yang lebih positif terhadap resolusi konflik menambah kompetensi warganegara (*civic competence*) khususnya dalam hal sikap warganegara (*civic dispositions*). Dengan sikap positif terhadap resolusi konflik ini berarti siswa tidak cenderung memandang konflik sebagai sesuatu yang negatif. Mereka selanjutnya memiliki kecenderungan lebih positif untuk menyelesaikan sendiri konfliknya dan membantu menyelesaikan konflik



orang lain dengan cara yang damai, demokratis dan konstruktif, bukan melalui kekerasan, menuju ke arah pemecahan masalah yang sama-sama menguntungkan (*win-win problem solving*).

*Ketiga*, keterampilan dalam resolusi konflik, antara lain keterampilan menggunakan strategi negosiasi dan mediasi, menurunkan eskalasi konflik, dan memahami perspektif pihak lain, dapat dikuasai siswa dengan baik setelah mereka mengikuti implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik. Dengan demikian implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik melalui Pendidikan Kewarganegaraan ternyata secara efektif juga mampu memberikan dampak positif bagi penguasaan siswa terhadap keterampilan resolusi konflik. Penguasaan keterampilan resolusi konflik yang menambah pada kompetensi warganegara (*civic competence*) dalam hal keterampilan warganegara (*civic skills*), yang disinergikan dengan pengetahuan dan sikap positif terhadap resolusi konflik dapat menjadi modal kekuatan bagi siswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara damai, demokratis, dan konstruktif.

*Keempat*, peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam resolusi konflik siswa sebagai dampak dari implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik secara terpadu sangat efektif untuk memperkaya kompetensi warganegara (*civic competence*) masa kini, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan warganegara (*civic intelligence*) yang multidimensi, tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan partisipasi warganegara (*civic participation*) dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kompetensi dalam melakukan resolusi konflik ini dapat menjadi bagian dari nilai-nilai

kebaikan warganegara (*civic virtue*) dan budaya warganegara (*civic culture*) yang terinternalisasi dalam diri siswa, sehingga mereka senantiasa menyelesaikan konflik secara damai, demokratis, dan konstruktif. Keberhasilan implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik di sekolah dapat memberikan dampak positif bagi terciptanya sekolah yang damai dan sehat secara psikologis, yang kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar yang baik. Dalam jangka panjang program pengajaran ini dapat berkontribusi bagi terciptanya suatu masyarakat yang mampu menyelesaikan konflik secara sehat, demokratis dan konstruktif.

*Kelima*, implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik juga memiliki dampak pengiring yang positif bagi pembaruan dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan di kelas. Dengan prinsip pembelajaran yang berpusat kepada siswa, berbasis nilai, bermakna, menantang, demokratis, mengutamakan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta dengan menerapkan berbagai metode yang variatif, mendorong siswa menjadi lebih aktif, kreatif dan berani mengambil inisiatif dalam proses belajar. Pembelajaran yang juga menerapkan pendekatan personal dan afektif mampu menciptakan suasana belajar yang lebih akrab, menyentuh afeksi, menarik, dan menyenangkan. Model ini terbukti memiliki dampak pengiring bagi peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah (*problem solving*), kemampuan belajar secara bersama (*cooperative learning*), dan kepekaan untuk memahami aspek afeksi atau emosi pihak lain.

*Keenam*, Model Pengajaran Resolusi Konflik yang dalam implementasinya terbukti menuntut kemampuan pemecahan masalah,

pengambilan keputusan, dan kemampuan berfikir secara kritis dan analitis, serta reflektif, yang disertai dengan pengambilan keputusan nilai yang bernalar dan demokratis akan berjalan dengan lebih baik jika berada dalam konteks tradisi pengajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat *reflective inquiry, decision making, rational problem solving, atau social action*, yang dipadukan dengan pendekatan pendidikan afektif (*affective education*), yang didasari oleh pandangan filsafat pendidikan progresivisme, reskonstruksionisme, dan humanisme. Model ini akan kurang efektif jika dilaksanakan dalam konteks pengajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan yang menggunakan tradisi *citizenship transmission* yang hanya mengutamakan penanaman dan indoktrinasi nilai. Model ini juga kurang tepat pada tradisi pengajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *social sciences* yang didasari pada pandangan esensialisme, yang lebih menekankan pada penguasaan konsep disiplin ilmu secara terstruktur.

*Ketujuh*, Model Pengajaran Resolusi Konflik dengan pendekatan workshop yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA ternyata dapat diimplementasikan dalam konteks persekolahan di Indonesia dengan penyesuaian ke dalam konteks sosio-kultural sekolah dan masyarakat Indonesia. Namun implementasi ini perlu disertai dengan beberapa perubahan dan penyesuaian model, antara lain karena: (a) langkah mengkaji agenda kegiatan sebagai langkah kedua pada model pengajaran perlu dihilangkan, karena ternyata kurang efektif, (b) penggunaan block waktu (diberikan secara berturut-turut dalam empat

pertemuan) ternyata kurang baik, karena materi Pengajaran Resolusi Konflik seperti terpisah dengan materi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, (c) waktu yang tersedia tidak memadai jika model hanya diberikan dalam empat topik dan empat pertemuan, sehingga perlu ada pemecahan topik, dan (d) beberapa contoh skenario cerita dalam model masih perlu disesuaikan dengan konteks sosial budaya Indonesia, termasuk strategi penyelesaian konflik yang sesuai dengan kultur sekolah dan masyarakat Indonesia.

## **5.2 Implikasi Hasil Penelitian**

### **5.2.1 Implikasi pada Penyempurnaan Model**

Model Pengajaran Resolusi Konflik yang diintegrasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan hasil penelitian terbukti cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa dalam resolusi konflik. Hasil penelitian memberikan implikasi tentang perlu adanya penyempurnaan pada model yang diimplementasikan. Implikasi hasil penelitian terhadap penyempurnaan Model Pengajaran Resolusi Konflik ini antara lain sebagai berikut:

- a. Langkah Model pengajaran Resolusi Konflik yang semula memiliki lima langkah, yakni (1) menggugah perhatian, (2) mengkaji agenda kegiatan, (3) mensinergikan kemampuan, (4) memantapkan kemampuan, dan (5) mencerahkan kembali suasana, perlu disederhanakan menjadi empat langkah, yaitu meliputi: (1) menggugah perhatian, (2) mensinergikan kemampuan, (3) memantapkan kemampuan, dan (4) mencerahkan kembali suasana. Langkah mengkaji agenda kegiatan tampaknya perlu dihilangkan, karena ternyata kurang efektif, di mana siswa tidak begitu

- memperhatikan agenda apa yang akan dilakukan guru dalam menerapkan Pengajaran Resolusi Konflik tersebut.
- b. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa tidak semua metode yang disarankan dapat dilaksanakan di kelas karena terhambat oleh sarana dan situasi kelas yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, beberapa metode yang disarankan untuk digunakan dalam model (seperti *go-round* dan *fish-bowl*) sekedar merupakan alternatif metode yang dapat dipilih guru yang perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi kelas.
  - c. Implementasi sistem blok waktu dalam penyajian Model Pengajaran Resolusi Konflik (empat topik disajikan secara berturut-turut) yang ternyata kurang baik, perlu diubah dengan mengintegrasikan ke dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan urutan kurikulum dan kelas. Hal ini agar materi Pendidikan Kewarganegaraan dapat disampaikan secara jelas dan mendalam tanpa kehilangan makna dengan diintegrasikan/ disisipkannya materi Pengajaran Resolusi Konflik.
  - d. Karena waktu yang tidak memadai jika model hanya diberikan dalam empat topik dan empat pertemuan, maka perlu ada pemecahan topik, sehingga model dapat disajikan dalam lima atau enam pertemuan. Hal ini akan memungkinkan pengetahuan, sikap dan keterampilan resolusi konflik dapat dikuasai oleh siswa secara lebih mendalam.
  - e. Model Pengajaran Resolusi Konflik yang awalnya dikembangkan di Barat (khususnya Amerika Serikat) perlu disesuaikan alur, strategi, dan contoh ceritanya dengan konteks sosial budaya sekolah dan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, beberapa contoh skenario cerita dalam model yang telah ada perlu diperbaiki.



- f. Implementasi konteks sosial budaya yang khas pada setiap sekolah dapat mendukung bagi lebih bermaknanya Pengajaran Resolusi Konflik. Misalnya, sekolah yang bemuansa agamis, seperti SMA PGII yang Islamis, dapat mempengaruhi Model Pengajaran Resolusi Konflik dalam suasana yang agamis, seperti mengaitkan model resolusi konflik yang diajarkan dalam Islam ke dalam Model Pengajaran Resolusi Konflik yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

### **5.2.2 Implikasi pada Pengajaran PKN dan PIPS**

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa Model Pengajaran Resolusi Konflik yang diintegrasikan melalui pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA telah menunjukkan dampak yang positif terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dalam resolusi konflik. Hal ini membawa implikasi bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu memberikan ruang atau wadah integrasi bagi Pengajaran Resolusi Konflik, yang secara teoritis dan empiris memiliki kekuatan untuk membantu pembinaan siswa menjadi warga negara yang baik dan demokratis.

Model Pengajaran Resolusi Konflik yang dijiwai oleh pandangan progresivisme, rekonstruksionisme, dan humanisme menuntut Pendidikan Kewarganegaraan dan juga Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk tidak sekedar mengajarkan memorisasi dan transfer fakta, konsep, teori ilmu-ilmu sosial dan nilai-nilai budaya tanpa dikaji secara kritis, analitis, sintesis, evaluatif, dan reflektif. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang dituntut sebagai wadah Pengajaran Resolusi

Konflik adalah pengajaran yang hendaknya mampu mendidik siswa untuk menjadi warganegara demokratis yang berfikir kritis, yang memecahkan masalah-masalah sosial, termasuk dalam menyelesaikan masalah konflik di sekolah maupun di masyarakat.

Sistem penyampaian (*delivery system*) pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan juga Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diharapkan menjadi tempat integrasi Pengajaran Resolusi Konflik hendaknya bukan sekedar monolog dan berpusat pada guru tetapi harus menggunakan multimetode dan multistrategi. Sistem penyampaian pun perlu dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak, interaktif dialogis, bermakna, berbasis nilai, menantang, mendorong aktivitas, kreativitas dan inisiatif, mengembangkan kemampuan berfikir kritis, analitis, sintesis, evaluatif, dan reflektif. Pembelajaran pun hendaknya berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan demokratis, serta dalam suasana kebersamaan kelompok (*democratic and cooperative learning*), karena ternyata guru yang mampu dekat dengan siswa dan mampu mengendalikan kelas ternyata terbukti lebih mampu meningkatkan hasil belajar pada resolusi konflik.

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pun mesti menjadi wahana bagi pendidikan afektif, karena ternyata Model Pengajaran Resolusi Konflik dengan pendekatan afektif, yang menciptakan suatu komunitas kelas/sekolah yang damai, terbukti efektif dalam pengajaran resolusi konflik. Dengan demikian Pengajaran Resolusi Konflik yang bersifat afektif akan berhasil jika pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan IPS bersifat afektif pula.

Karena Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Kurikulum 1994 dan Suplemen 1999, lebih berada pada tradisi *citizenship transmission*, dan Pendidikan IPS pada umumnya berada pada tradisi *social science education* yang berstruktur monodisiplin, yang dipengaruhi oleh filsafat pendidikan esensialisme, maka pengintegrasian Pengajaran Resolusi Konflik ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan juga PIPS memang sama sekali tidak bisa menghilangkan pengaruh esensialisme tersebut. Oleh karena itu, implementasi Pengajaran Resolusi Konflik yang didasari pandangan progresivisme, rekonstruksionisme, dan humanisme yang interdisipliner dan afektif perlu dijalankan secara berdampingan dalam kurikulum yang menganut pandangan esensialisme yang monodisipliner.

Perlunya pembaruan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan IPS yang dapat mengintegrasikan Pengajaran Resolusi Konflik, sebagai implikasi dari penelitian ini, pada akhirnya berimplikasi pula pada perlunya kesamaan pandangan, dan kemampuan serta kemauan para pemegang kebijakan pendidikan, pengembang kurikulum, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan para guru dalam mengimplementasikan Pengajaran Resolusi Konflik di sekolah.

### 5.3 Dalil

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dihasilkan beberapa dalil yang dapat digunakan bagi Pengajaran Resolusi Konflik:

- a. Kemampuan menyelesaikan konflik secara damai, demokratis dan konstruktif memerlukan dukungan kemampuan yang sinergis antara pengetahuan tentang resolusi konflik, sikap positif terhadap resolusi

konflik, dan keterampilan resolusi konflik, yang dapat ditumbuhkan secara terpadu melalui Pengajaran Resolusi Konflik.

- b. Pengajaran Resolusi Konflik perlu didasari oleh pemahaman yang positif terhadap konflik, penghargaan pada perbedaan dan kemajemukan (pluralitas), dikembangkan dalam konteks kerjasama, dan menjadikan pemecahan masalah sebagai inti kegiatan.
- c. Pengajaran Resolusi Konflik yang lebih menekankan pada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang menyangkut konflik sosial, akan lebih efektif jika diajarkan melalui Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan yang berada pada tradisi *reflective inquiry, decision making, rational problem solving, dan social action*, yakni pendidikan yang berpusat pada masalah.
- d. Penyelesaian konflik yang melibatkan aspek afektif pihak-pihak yang berkonflik mendorong perlunya penerapan model Pengajaran Resolusi Konflik yang bersifat personal dan afektif, yang dipadukan dengan pendekatan yang mengembangkan kemampuan berfikir kritis, analitis, dan reflektif.
- e. Pengajaran Resolusi Konflik akan memiliki kekuatan (*powerful*) jika didukung oleh pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendorong aktivitas, kreativitas, dan daya inisiatif siswa, bersifat interaktif-dialogis, menantang kemampuan berfikir pada tingkat tinggi, bermakna, berbasis nilai, dikembangkan dalam suasana kekeluargaan, demokratis, dan menyenangkan, serta pembelajaran yang mendorong kerjasama (*co-operative learning*).

## 5.4 Rekomendasi

### 5.4.1 Rekomendasi bagi Guru dan Sekolah

Konflik-konflik sosial di masyarakat dan konflik-konflik antarsiswa atau antarpelajar yang begitu menggejala saat ini, yang seringkali disertai tindakan kekerasan yang sangat merugikan, menimbulkan keprihatinan yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Sekolah dan para pendidiknyanya perlu memiliki tanggung jawab moral untuk mengatasi keprihatinan ini dengan memikirkan dan menerapkan program yang dapat membina siswa sebagai generasi baru bangsa Indonesia yang mampu menyelesaikan konflik-konflik sosial secara damai, demokratis, dan konstruktif, tanpa kekerasan. Jika tidak ada pendidikan yang secara sengaja mendidik warganegara untuk memiliki kemampuan seperti itu, maka sulit kiranya kita mengharapkan terciptanya sekolah dan masyarakat Indonesia yang damai tanpa kekerasan.

Dampak yang efektif dari implementasi Pengajaran Resolusi Konflik terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan resolusi konflik siswa sebagaimana dihasilkan dalam penelitian, secara empiris menunjukkan perlunya penerapan Pengajaran Resolusi Konflik dalam sistem persekolahan di Indonesia. Namun struktur kurikulum persekolahan yang telah ada, dengan jumlah mata pelajarannya yang telah begitu banyak, kemungkinan tidak dapat diubah, sehingga Pengajaran Resolusi Konflik tidak memungkinkan untuk diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Oleh karena itu, Pengajaran Resolusi Konflik ini, sebagaimana hasil penelitian yang telah terbukti efektif, dapat diterapkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan, yang

disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kedalaman materinya, dan memungkinkan pula untuk diterapkan pada mata pelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial lainnya.

Penelitian yang penulis lakukan untuk mengimplementasikan model berdasar pada Kurikulum PPKn 1994 dan Suplemen 1999. Beberapa konsep atau pokok bahasan dalam Kurikulum PPKn 1994 (kelas 2) yang dapat menjadi wadah integrasi topik-topik Model Pengajaran Resolusi Konflik antara lain: Kesatuan, Kedisiplinan, Saling menghormati, Tanggung jawab (khususnya tentang Demokrasi Pancasila), Kerjasama (khususnya tentang perjuangan kemerdekaan), Martabat dan Harga diri (khususnya tentang hak asasi manusia), dan Demokrasi Pancasila.

Pada saat ini kurikulum yang berlaku di SMA adalah Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, yang telah mulai dilaksanakan secara bertahap. Pengajaran Resolusi Konflik yang membina siswa untuk memahami, menghayati, dan terampil menggunakan keterampilan resolusi konflik memungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam Kurikulum 2004. Materi atau konsep pada Kurikulum PKN SMA 2004 yang dapat menjadi wadah pengintegrasian Pengajaran Resolusi Konflik antara lain: Penegakan Hak Azasi Manusia dan implikasinya, Masyarakat Politik, Prinsip-prinsip Demokrasi (kelas X), Keterbukaan dan Jaminan Keadilan, Sistem Politik, Hubungan Internasional, Sistem hukum internasional dan Pengadilan Internasional (Kelas XI). Guru dapat menentukan pada materi atau konsep PKN yang mana topik-topik Pengajaran Resolusi Konflik akan diintegrasikan. Pengintegrasian ini secara eksplisit perlu masuk dalam silabus atau rencana

pembelajaran PKN, sebagaimana dicontohkan dalam pedoman model yang terdapat dalam lampiran disertasi ini.

Namun demikian harus difahami bahwa Kurikulum SMA 2004 untuk mata pelajaran PKN dan Pendidikan IPS pada umumnya sangat dipengaruhi oleh filsafat pendidikan esensialisme. Berdasar pada pandangan esensialisme ini, Pendidikan IPS, termasuk PKN, di SMA disajikan dalam mata pelajaran ilmu-ilmu sosial yang terpisah dan memberikan penekanan pada penguasaan konsep dan teori dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang sangat terstruktur. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan Pengajaran Resolusi Konflik, yang berlandas pada progresivisme, rekonstruksionisme, dan humanisme, ke dalam mata pelajaran PKN atau Pendidikan IPS lainnya, perlu ada kemauan dan keberanian para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan pembaruan pendidikan.

Pengintegrasian Pengajaran Resolusi Konflik ke dalam PKN dan Pendidikan IPS berdasar Kurikulum SMA 2004 menuntut bukan hanya penguasaan konsep dan teori ilmu sosial secara terstruktur, tetapi juga menuntut kemampuan siswa untuk mampu memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah sosial secara kritis, demokratis, dan konstruktif. Sementara itu, sistem penyampaian pelajaran (*delivery system*) tidak cukup hanya menggunakan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) yang mengajarkan materi secara linear dan menekankan pada modeling, melainkan terutama pada pembelajaran yang berdasar pada teori dialektika-konstruktivisme, yang menekankan siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri dan mampu memecahkan masalah.



Pengintegrasian Pengajaran Resolusi Konflik ke dalam mata pelajaran hanya merupakan salah satu upaya penerapan Pendidikan Resolusi Konflik dalam kerangka luas. Untuk mendukung keberhasilan penerapan gagasan Pendidikan Resolusi Konflik, maka selain melalui pengintegrasian dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan atau juga Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial lainnya, sebaiknya pihak sekolah menerapkan gagasan Pendidikan Resolusi Konflik ke dalam kebijakan sekolah, penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang kondusif, pembuatan poster-poster yang berisi pesan Pendidikan Resolusi Konflik, pelatihan keterampilan resolusi konflik sebagai kegiatan ekstrakurikuler, pembentukan kelompok mediator sejawat (*peer-mediator*), dan sebagainya. Dengan kata lain, sebaiknya sekolah menggunakan pendekatan komprehensif atau pendekatan menyeluruh dalam menerapkan Pendidikan Resolusi Konflik.

Pengajaran atau Pendidikan Resolusi Konflik merupakan salah satu gagasan pembaruan pendidikan. Mungkin banyak pembaruan-pembaruan pendidikan lainnya yang ingin diterapkan di sekolah, sehingga dapat menambah kebingungan guru atau pihak sekolah dalam menerapkannya. Penerapan gagasan Pengajaran Resolusi Konflik ini bisa berjalan bersama-sama dengan gagasan pembaruan pendidikan lainnya, khususnya di bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan IPS, seperti gagasan pendidikan multibudaya (*multicultural education*), pendidikan dengan portofolio, pengajaran yang demokratis (*democratic teaching*), dan sebagainya.

Cara apapun yang akan dilakukan sekolah dalam menerapkan program Pendidikan atau Pengajaran Resolusi Konflik, apakah melalui



pendekatan komprehensif ataupun melalui pengintegrasian ke dalam mata pelajaran, maka perlu ada upaya untuk mempersiapkannya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan sekolah adalah memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pendidikan/pengajaran resolusi konflik kepada para pendidik dan tenaga kependidikan yang akan melaksanakan program tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa sekolah menengah kadangkala menjadi lembaga yang terpisah dari lingkungannya (*isolated institution*), termasuk dengan sekolah-sekolah di sekitarnya. Semestinya antarsekolah menengah yang berdekatan dapat saling memanfaatkan fasilitas atau sumber daya yang mereka miliki (*resources sharing*), di mana satu sekolah (khususnya siswanya) dapat memanfaatkan sumber daya sekolah lainnya. Dengan demikian, siswa masing-masing sekolah dapat saling berkunjung, sehingga siswa antarsekolah tersebut dapat saling berkenalan dan saling berhubungan secara akrab. Hal seperti ini, jika mampu terwujud, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konflik siswa (tawuran) antarsekolah.

#### **5.4.2 Rekomendasi Bagi LPTK**

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik para calon guru, perlu turut berperan dalam mendiseminasikan gagasan Pengajaran Resolusi Konflik, dengan cara memberikan pendidikan kepada mahasiswa calon guru tentang Pengajaran Resolusi Konflik. Pengajaran Resolusi Konflik untuk mahasiswa calon guru ini memiliki dua manfaat, yakni mendidik mahasiswa untuk mampu

menyelesaikan konflik mereka dan konflik masyarakatnya secara demokratis dan konstruktif, juga mendidik mereka untuk mampu mengajarkan Model Pengajaran Resolusi Konflik ketika mereka sudah menjadi guru.

Cara yang dapat dilakukan LPTK untuk memberikan Pengajaran Resolusi Konflik adalah dengan memberikan mata kuliah Resolusi Konflik yang berdiri sendiri atau terintegrasi pada mata kuliah tertentu. Program pengajaran ini dapat diberikan sebagai mata kuliah umum yang diberikan kepada semua jurusan atau mata kuliah khusus pada jurusan-jurusan tertentu yang relevan, seperti jurusan-jurusan yang mengembangkan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pendidikan yang menyiapkan calon-calon guru sekolah lanjutan dan menengah, dan jurusan/program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang menyiapkan calon-calon guru sekolah dasar.

#### **5.4.3 Rekomendasi bagi Pemegang Kebijakan Pendidikan**

Implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik dalam sistem persekolahan di Indonesia memerlukan kesamaan pandangan dan kemauan yang kuat dari para pengambil kebijakan pendidikan di pusat dan daerah serta dari para pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Pihak sekolah biasanya akan lebih bersedia untuk menerapkan suatu inovasi pendidikan jika telah ada kebijakan dari Pusat (Depdiknas). Oleh karena itu, implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik ini akan secara cepat terdiseminasi jika pihak Depdiknas menetapkannya dalam bentuk kebijakan atau keputusan.

Selain itu, dengan penerapan otonomi dan desentralisasi pendidikan, serta penerapan manajemen berbasis sekolah, sebenarnya pengambil kebijakan pendidikan di Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota) dan pihak sekolah dapat lebih leluasa untuk memasukkan gagasan Pengajaran Resolusi Konflik ini ke dalam kegiatan kurikuler ataupun ekstrakurikuler di sekolah.

Jika program Pengajaran Resolusi Konflik ini telah dapat masuk ke dalam kebijakan pendidikan Pusat atau Daerah, maka langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para kepala sekolah, pengawas dan guru tentang Pengajaran Resolusi Konflik tersebut, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan di sekolah memiliki kesamaan pandangan, kemauan, dan kesiapan kemampuan untuk menerapkan program tersebut.

#### **5.4.4 Rekomendasi bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian yang penulis lakukan ini masih terbatas pada implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik dengan mengintegrasikan ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang SMA. Menanamkan sikap dan keterampilan untuk resolusi konflik sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak usia dini agar anak-anak terbiasa menyelesaikan konflik secara demokratis dan konstruktif. Dengan demikian Pengajaran Resolusi Konflik sebenarnya sudah dapat diterapkan pada TK, SD, SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi, yang kedalaman materi dan kompetensi yang dituntut disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis pada setiap jenjang. Penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan

penelitian tentang pengembangan atau implementasi Model Pengajaran Resolusi Konflik pada jenjang pendidikan selain SMA, pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain selain Pendidikan Kewarganegaraan, implementasi pada program ekstrakurikuler, dan termasuk pula Model Pengajaran Resolusi Konflik yang dapat diterapkan pada masyarakat luas di luar persekolahan.

Penelitian yang telah kami lakukan masih terbatas untuk mengetahui efektivitas implementasi suatu model dan khususnya pada dampaknya terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa tentang resolusi konflik yang diamati melalui observasi dan tes tertulis di sekolah. Penelitian ini tidak meneliti pada sejauh mana model Pengajaran Resolusi Konflik mempunyai dampak positif dalam mengurangi jumlah konflik di sekolah dan masyarakat. Peneliti berikutnya dapat meneliti hal tersebut, dengan melakukan implementasi model jangka panjang dan pengamatan yang terus-menerus.

